



POLDA PERIKSA UJ DAN ZUL

Sayangnya Anggota DPR RI itu Tak Ditahan



Mukson Munandar. Dok

PONTIANAK-RK. Sebelumnya Polda Kalbar telah menetapkan Iswanto sebagai tersangka kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah Kalbar tahun anggaran 2006-2008 sebesar Rp22,14 miliar. Polda mengaku telah memeriksa Zul mantan Ketua DPRD Kalbar dan UJ mantan gubernur Kalbar yang kini

keduanya menjabat anggota DPR-RI pemilihan Kalbar.

"Tersangka Zul dan UJ diperiksa pada awal 2013. Tetapi tidak ditahan dengan pertimbangan masih kurang alat bukti. Kita saat ini juga mencari bukti yang kuat untuk memproses hukum keduanya," kata AKBP Mukson Munandar, Kabid Humas Polda Kalbar, Rabu (24/4). Alasan Mukson tidak menahan Zul dan UJ karena keduanya cukup kooperatif dan alamat keduanya jelas. "Kalau sampai ditahan, dikawatirkan waktu penahanan akan habis sementara kasusnya belum juga bisa diajukan hingga ke pengadilan. Contohnya kasus tersangka Iswanto mantan Wakil Bendahara KONI Kalbar baru bisa ditahan setelah dua tahun diproses, berdasarkan

■ Halaman 15

Sayangnya Anggota.....dari halaman 9

pengalaman itulah kedua tersangka tersebut belum ditahan," kilah Mukson.

Untuk kesekian kalinya Mukson mengatakan, proses hukum terhadap dua tersangka itu masih harus menunggu hasil audit BPK Kalbar. Namun dirinya tidak menjelaskan kapan audit tersebut selesai dilakukan. Padahal Bansos bersumber dari APBD yang diduga dikorupsi merupakan anggaran 2006-2008. Mestinya anggaran tersebut telah selesai

diaudit BPK RI sesuai dengan laporan pertanggungjawaban gubernur saat itu. "Kita harap masyarakat harus tetap bersabar. Karena kasus ini akan tetap diproses, karena sampai saat ini, kita masih menunggu hasil audit BPK untuk dua orang yang diduga terlibat kasus korupsi Bansos tersebut," ungkap Mukson. Mukson mengatakan, jika memang hasil audit dari BPK sudah keluar terkait dugaan keterlibatan Zul dan UJ dalam kasus korupsi Bansos

anggaran 2006-2008, maka polisi segera mengirim berkas ke Kejaksaan Tinggi. Kepala Kejati Kalbar Jasman Panjaitan beberapa waktu lalu mengatakan, kasus yang diduga melibatkan dua pejabat negara itu masih P19. Berkas yang sudah dilimpahkan dikembalikan kepada penyidik kepolisian untuk dilengkapi kembali. "Hasil auditnya yang kurang lengkap. Makanya kami dari kejaksaan mengembalikan berkas itu," jelas Jasman. (sul)